

**EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM PENINGKATAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Wahyu Wandira
NPP. 32.0915

Asdaf Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Email: wahyuwandira126@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd, M.Ap

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): The main issue in this research is the low ownership rate of the Child Identity Card (KIA) in Bulukumba Regency. Purpose: The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Department of Population and Civil Registration of Bulukumba Regency in increasing Child Identity Card (KIA) ownership. Method: This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, in-depth interviews with 20 informants, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using Duncan's effectiveness theory in Steers (1985), which consists of three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. Result: The results indicate that the effectiveness of KIA services is categorized as fairly good. In terms of goal achievement, there has been an increase in KIA ownership each year, although the national target has not yet been met. In terms of integration, there is collaboration between Disdukcapil, schools, and village governments in implementing collective services. In terms of adaptation, adjustments have been made through mobile services and improvements in facilities, although challenges remain in the form of limited human resources, underutilization of information technology, and geographic and internet access barriers in remote areas. Conclusion: The effectiveness of the Bulukumba Disdukcapil in improving KIA ownership is moderately successful but not yet optimal. There needs to be greater emphasis on community participation, digital service utilization, and equal service access in remote areas. It is recommended to enhance collaboration with schools, local communities, and village officials to achieve the national target.

Keywords: Effectiveness; Child Identity Card; Population Administration

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam terhadap 20 informan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Steers (1985), yang mencakup tiga indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan KIA tergolong cukup. Pada indikator pencapaian tujuan, ditemukan adanya peningkatan jumlah kepemilikan KIA setiap tahun, meskipun belum mencapai target nasional. Pada indikator integrasi, terdapat kerja sama antara Disdukcapil dengan sekolah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan layanan kolektif. Sementara pada indikator adaptasi, telah dilakukan penyesuaian melalui layanan jemput bola dan perbaikan sarana, namun masih terkendala oleh terbatasnya SDM, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta hambatan geografis dan jaringan internet di daerah terpencil. **Kesimpulan:** Efektivitas Disdukcapil Bulukumba dalam peningkatan kepemilikan KIA telah berjalan cukup baik, namun belum maksimal. Perlu penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemerataan layanan di wilayah terpencil. Disarankan agar kolaborasi dengan sekolah, komunitas lokal, dan perangkat desa terus ditingkatkan agar target nasional dapat tercapai.

Kata kunci: Efektivitas; Kartu Identitas Anak; Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia, khususnya Kartu Identitas Anak (KIA), merupakan salah satu hambatan mendasar dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang inklusif dan berkeadilan. KIA bukan hanya berfungsi sebagai dokumen identitas anak, melainkan juga menjadi prasyarat penting untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tanpa kepemilikan KIA, anak-anak berisiko tidak tercatat secara administratif, yang pada akhirnya berdampak pada pengabaian hak-hak sipil mereka.

Pelayanan publik yang berkualitas akan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, efektivitas pelayanan publik mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan dan harapan masyarakat (Kamelia & Veranita, 2022). Aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang telah berkontribusi melalui pajak dan retribusi berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara. Dalam konteks pembangunan kependudukan, pelayanan administrasi menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengarahkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh (Gatiningsih dan Sutrisno, 2017).

Penelitian (Munawaroh, 2017) menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, tidak hanya disebabkan oleh prosedur pelayanan yang tidak sesuai SOP, tetapi juga oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan kondisi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bulukumba, yang

menunjukkan bahwa upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan memerlukan perbaikan sistemik dan dukungan manajerial yang kuat.

Di Kabupaten Bulukumba, hingga semester I tahun 2024, tingkat kepemilikan KIA baru mencapai 45,44%, jauh di bawah target nasional sebesar 75%. Capaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, serta menjadi indikator bahwa efektivitas program pelayanan KIA masih perlu ditingkatkan. Padahal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba telah menjalankan berbagai inovasi, seperti layanan jemput bola “Lorong Jelita”, digitalisasi layanan, dan pelayanan kolektif di sekolah. Namun demikian, berbagai hambatan struktural dan sosial seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kesadaran masyarakat, serta kendala geografis dan jaringan internet masih menjadi faktor penghambat pencapaian yang optimal.

Selanjutnya, dalam konteks penguatan sistem, pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) menjadi krusial. Menurut (Sasongko, 2023), keberhasilan implementasi inovasi pelayanan digital sangat bergantung pada kesiapan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam hal ini, keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi agar digitalisasi pelayanan tidak justru menciptakan ketimpangan baru.

Di sisi lain, data kependudukan sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Data tersebut memainkan peran penting dalam pengelolaan serta penanggulangan masalah kependudukan saat ini (Hutasoit, 2017:66). Rendahnya kepemilikan KIA akan berdampak pada buruknya kualitas dan akurasi data penduduk usia anak, yang secara langsung memengaruhi perencanaan dan evaluasi kebijakan di berbagai sektor. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan KIA tidak hanya penting dari sisi pelayanan administratif, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan berbasis data yang berkualitas.

Sebagai daerah dengan karakteristik geografis yang beragam, Bulukumba membutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga adaptif dan partisipatif. Dalam konteks ini, penting untuk mengukur efektivitas Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan KIA. Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985), yang meliputi tiga indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Efektivitas sendiri dapat dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Sillahi, 2015) Suatu program dikatakan efektif apabila hasil atau output yang dicapai selaras dengan target yang direncanakan. Oleh karena itu, melalui kerangka teori ini, efektivitas pelayanan Disdukcapil tidak hanya diukur berdasarkan angka pencapaian, tetapi juga kekuatan kolaborasi lintas sektor serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tantangan lapangan. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas layanan KIA menjadi langkah penting dalam mendorong pemerataan hak identitas anak dan menciptakan tata kelola kependudukan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba, sementara KIA merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak anak. KIA bukan hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga menjadi pintu masuk anak dalam memperoleh akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Meskipun pemerintah pusat telah menargetkan pencapaian KIA sebesar 75% hingga tahun 2024, kenyataannya Kabupaten Bulukumba baru mencapai angka 45,44%, menunjukkan kesenjangan antara target nasional dengan capaian daerah.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya pencapaian KIA ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen KIA. Masih banyak masyarakat yang menganggap KIA belum terlalu dibutuhkan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, pesisir, dan wilayah adat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan edukasi serta rendahnya literasi administrasi masyarakat. Di sisi lain, kendala geografis menjadi tantangan tersendiri, di mana tidak semua wilayah mudah dijangkau oleh layanan reguler Disdukcapil.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di tubuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Meskipun telah dilakukan inovasi layanan seperti “Lorong Jelita” dan pelayanan kolektif di sekolah-sekolah, capaian yang dihasilkan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Fenomena lain yang muncul adalah belum optimalnya keterlibatan lintas sektor seperti perangkat desa, sekolah, tokoh masyarakat, maupun lembaga lokal dalam mendorong masyarakat untuk mengurus KIA. Padahal, kolaborasi menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pelayanan publik yang menasar komunitas akar rumput.

Rendahnya pencapaian ini menunjukkan bahwa terdapat celah antara program dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kepemilikan KIA, baik dari segi pencapaian tujuan, integrasi dengan pihak lain, maupun kemampuan beradaptasi terhadap tantangan yang ada. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran konkret terhadap permasalahan yang dihadapi sekaligus sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian-penelitian ini menjadi pijakan penting dalam menyusun kerangka konseptual dan metodologis untuk mengkaji efektivitas program KIA di Kabupaten Bulukumba. Penelitian Yulimalinda, Sari Yuli (2022) meneliti efektivitas pendataan KIA di Disdukcapil Kota Banda Aceh

dengan menggunakan teori efektivitas Budiani. Penelitian ini menilai kinerja pelayanan berdasarkan empat indikator efektivitas dan menunjukkan bahwa pelayanan KIA di Banda Aceh cukup berhasil membantu meningkatkan kepemilikan KIA. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap efektivitas pelayanan KIA, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi dan teori yang digunakan. Penelitian Muhammad Rizqi Haji Ega Firnanda (2020) membahas implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori George C. Edward III. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan KIA sudah berjalan cukup baik namun masih perlu penyempurnaan, khususnya pada aspek pendaftaran online. Penelitian ini memberikan perspektif penting mengenai peran kebijakan dalam mendukung efektivitas pelayanan, meskipun menggunakan teori dan pendekatan berbeda. Sementara itu, Susi Ratnawati (2023) meneliti evaluasi program KIA pada sistem layanan kependudukan digital (Go Digital) di Disdukcapil. Peneliti menggunakan teori evaluasi William N. Dunn dan menemukan bahwa program tersebut mampu mencapai target, namun masih terkendala pada efisiensi akibat keterbatasan anggaran. Penelitian ini relevan sebagai referensi dalam memahami bagaimana digitalisasi berperan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan KIA. Penelitian lainnya oleh Zurriyatul Husna & Mayarni, (2022) menggunakan teori efektivitas Duncan (1972) dalam meneliti efektivitas layanan KIA melalui program OASE (Online Anywhere Service) di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menemukan beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan layanan KIA secara daring. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan, khususnya dalam penggunaan teori yang sama dan fokus pada evaluasi layanan KIA, meskipun dengan konteks program yang berbeda. Hanandha Larasati, Maesaroh, dan Nina Widowati (2021) juga menggunakan teori Duncan dalam mengkaji efektivitas program KIA di Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa capaian tujuan dan integrasi program belum sepenuhnya optimal, meskipun aspek adaptasi sudah berjalan baik. Hambatan utama terletak pada pandangan masyarakat yang masih menganggap KIA belum penting. Penelitian ini menjadi rujukan penting karena menggunakan teori yang sama dan membahas konteks yang mirip, yaitu tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA. Selanjutnya, penelitian Nanda Oktaviani (Oktaviani, 2021) berjudul *Efektivitas Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dalam Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor* menunjukkan bahwa program ADM belum efektif secara keseluruhan. Berdasarkan empat indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi, tujuan program, dan pemantauan, dua indikator terakhir dinilai belum berjalan optimal. Masih ditemukan kendala dalam implementasi ADM, terutama terkait ketidaksesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan teknologi saja tidak cukup, dan perlu didukung oleh strategi edukatif serta penguatan pemantauan program agar hasil pelayanan lebih maksimal. Sementara itu, penelitian Untung Sri Hardjanto (2019) di Kota Semarang menyoroti pentingnya dasar hukum dalam pelaksanaan program KIA. Pemerintah Daerah Kota Semarang menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2016 sebagai dasar hukum program tersebut, namun pelaksanaannya baru dimulai pada 2017 karena rendahnya kepemilikan akta kelahiran anak. Ini menunjukkan bahwa kesiapan administratif dan data dasar sangat penting dalam pelaksanaan program KIA. Terakhir, penelitian Windi Dwi Arista dan Wayan Suderana (2019) di Kabupaten Badung menemukan bahwa

meskipun distribusi KIA telah merata dan dirasakan semua lapisan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat dari KIA. Ini menunjukkan pentingnya aspek edukasi dan sosialisasi dalam mendukung implementasi program. Dengan mengacu pada berbagai penelitian tersebut, penulis menyadari bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait efektivitas pelayanan Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan KIA di daerah dengan tantangan geografis dan sosio-kultural tertentu seperti Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi juga menganalisis keterpaduan program, kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan beradaptasi Disdukcapil terhadap hambatan struktural dan sosial dalam pelayanan publik, sebagaimana dianalisis melalui kerangka teori efektivitas dari Duncan (1972).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan adalah mengkaji efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dalam peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba, daerah dengan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat literasi administrasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang berbeda dengan pendekatan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Yulimalinda (2022), Firnanda (2020), dan Ratnawati (2023) yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau teori implementasi kebijakan.

Selain itu, pengukuran atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985), yang mencakup tiga indikator utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ini membedakan dari penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Budiani, Edward III, ataupun teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian yang dilakukan oleh Zurriyatul Husna & Mayarni (2022) serta Larasati dkk. (2021) memang menggunakan teori Duncan, namun hanya fokus pada layanan berbasis digital dalam konteks perkotaan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada inovasi layanan berbasis masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di wilayah pinggiran.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah baik dari segi konteks wilayah, pendekatan yang digunakan, maupun kerangka teori yang diterapkan, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pelayanan KIA dalam konteks daerah yang menghadapi hambatan struktural dan sosial.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari teori efektivitas Duncan dalam Steers (1985)

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba. Menurut Simangunsong (2017:190) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan diri dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Selanjutnya Menurut Creswell (2013) pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap fenomena yang sedang berlangsung sebagaimana dijelaskan oleh Nazir, (2011).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dari berbagai perspektif pelaksana maupun penerima layanan. Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, seperti efektivitas pelayanan publik yang tidak dapat diukur hanya melalui angka, melainkan juga memerlukan pemahaman atas proses, konteks, dan interaksi sosial yang terlibat.

Penelitian ini juga menerapkan metode induktif, yakni pendekatan berpikir yang dimulai dari data empiris di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Menurut Nazir (2011:166), pendekatan induktif relevan untuk digunakan dalam meneliti proses yang dinamis dan kompleks, seperti efektivitas pelayanan publik dalam konteks administrasi kependudukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013:225) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang umum digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan KIA di kantor Disdukcapil dan saat program jemput bola seperti “Lorong Jelita”. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba serta di beberapa lokasi pelaksanaan pelayanan lapangan seperti sekolah dasar dan desa-desa tempat program jemput bola “Lorong Jelita” dilakukan. Proses pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari April hingga Mei 2024. Pemilihan lokasi dan waktu disesuaikan dengan agenda pelayanan KIA yang aktif dilaksanakan oleh Disdukcapil selama periode tersebut.

Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada 20 informan yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, staf teknis, operator sistem informasi administrasi kependudukan (SIK), kepala sekolah, kepala desa, dan masyarakat pemohon layanan. Dokumentasi berupa foto kegiatan, data statistik kepemilikan KIA, serta arsip laporan internal Disdukcapil digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelayanan KIA. Informan kunci terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk, Kepala Seksi Identitas Penduduk, serta petugas teknis dan operator SIAK. Mereka dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknis program KIA. Selain itu, kepala sekolah, kepala desa, dan masyarakat sebagai pengguna layanan dipilih untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dari sisi eksternal penyelenggara.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2013), yang menyatakan bahwa manusia sebagai instrumen memiliki fleksibilitas tinggi dalam memahami konteks sosial dan dapat melakukan penyesuaian selama proses penelitian. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, buku catatan lapangan, dan perangkat perekam suara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:338), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan ini dilakukan secara simultan dan berulang selama proses pengumpulan data berlangsung, sehingga memungkinkan peneliti melakukan refleksi dan interpretasi secara mendalam terhadap data yang diperoleh.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas dari Duncan (1973) yang terdiri dari tiga indikator utama: pencapaian tujuan (goal achievement), yaitu sejauh mana target program tercapai; integrasi (integration), yaitu sinergi antar aktor dalam pelaksanaan program; dan adaptasi (adaptation), yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap tantangan dan perubahan lingkungan. Ketiga indikator ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas layanan KIA yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bulukumba.

Dengan landasan teoritis dan metodologis yang kuat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami efektivitas layanan publik dalam bidang administrasi kependudukan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mendorong peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak di daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan indikator pertama dalam teori efektivitas Duncan yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai target atau output yang telah direncanakan. Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, pencapaian tujuan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), kesesuaian capaian dengan target nasional, serta respon masyarakat terhadap program yang dijalankan.

a. Meningkatnya Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peningkatan jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun menjadi indikator awal keberhasilan program yang dijalankan oleh Disdukcapil. Melalui inovasi layanan seperti program “Lorong Jelita” (Layanan Jemput Bola dari Lorong ke Lorong), pelayanan kolektif di sekolah, serta integrasi pelayanan KIA dengan pembuatan akta kelahiran, terjadi tren peningkatan angka kepemilikan. Namun, peningkatan tersebut belum signifikan dan masih berada di bawah target nasional.

Untuk melihat sejauh mana perkembangan tersebut, diperlukan pemetaan capaian tahunan secara kuantitatif sebagai dasar evaluasi program. Data capaian ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren dan mengevaluasi efektivitas dari berbagai strategi pelayanan yang telah diterapkan. Selain itu, penyajian data tahunan akan memudahkan analisis mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan memperlihatkan area yang masih memerlukan intervensi lebih lanjut. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Bulukumba, capaian kepemilikan KIA selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Capaian Kemilikan KIA tiga tahun terakhir

No.	Waktu	Wajib KIA	Memiliki KIA	
			Jumlah	%
1.	Tahun 2022	118.080	39.462	33,42 %
2.	Tahun 2023	123.669	52.893	42,77 %
3.	Tahun 2024	120.941	55.209	45,65 %

Sumber : Disdukcapil Kab. Bulukumba (2025)

Meskipun menunjukkan tren kenaikan, persentase kepemilikan KIA masih berada pada kisaran 40–45% dari total anak usia 0–17 tahun, sementara pemerintah pusat menargetkan minimal 75% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil masih belum maksimal dalam mencapai target tersebut.

b. Tercapainya Target Pelayanan KIA

Disdukcapil telah menyusun rencana kerja dan target pelayanan KIA setiap tahunnya. Target ini mencakup jumlah anak yang harus menerima KIA serta strategi untuk menjangkau populasi sasaran, termasuk melalui pelayanan langsung, pelayanan kolektif di sekolah, dan jemput bola ke desa-desa terpencil. Namun, realisasi target tidak selalu sejalan dengan perencanaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah petugas lapangan, kendala geografis, kurangnya antusiasme masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap KIA

Kesadaran masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian tujuan program KIA. Banyak orang tua belum memahami pentingnya KIA sebagai dokumen pendukung administrasi anak. Beberapa hanya mengurus KIA saat dibutuhkan untuk pendaftaran sekolah, BPJS, atau pembukaan rekening bank. Kurangnya pemahaman ini menjadi bukti bahwa masih dibutuhkan edukasi yang lebih intensif dari pihak Disdukcapil agar masyarakat memiliki kesadaran proaktif, bukan hanya reaktif.

d. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Sebagian masyarakat merasa puas dengan pelayanan langsung yang cepat dan efisien, terutama melalui mobil layanan keliling dan pelayanan kolektif di sekolah. Mereka menyebut layanan jemput bola sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warga di daerah terpencil. Namun, pada sisi lain, pelayanan digital atau mandiri seperti Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) belum banyak dimanfaatkan karena keterbatasan informasi, sarana, dan literasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kepuasan masyarakat belum merata pada semua jenis layanan, dan perlu adanya evaluasi serta pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat di berbagai segmen.

3.2. Integrasi

Integrasi dalam teori efektivitas Duncan dalam Steers (1985:53) mencerminkan sejauh mana sinergi dan koordinasi antar aktor atau unit kerja dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, Disdukcapil Kabupaten Bulukumba telah mengupayakan integrasi melalui dua hal utama: sosialisasi oleh petugas dan kerja sama dengan instansi lain.

a. Sosialisasi oleh Petugas

Pelaksanaan sosialisasi terkait penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) telah menjadi bagian penting dalam strategi Disdukcapil Kabupaten Bulukumba. Petugas melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah, desa-desa, serta melalui kegiatan posyandu dan layanan keliling. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA serta prosedur pengurusannya.

Namun demikian, intensitas dan jangkauan sosialisasi ini belum merata. Masih terdapat kecamatan dan desa yang belum sepenuhnya tersentuh oleh kegiatan sosialisasi, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman seperti Kecamatan Bonto Tiro dan Herlang. Beberapa hambatan yang ditemui antara lain keterbatasan jumlah petugas, akses jalan yang sulit, serta kurangnya media informasi yang tepat sasaran. Selain itu, materi sosialisasi masih bersifat umum dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal sebagai sarana komunikasi yang lebih luas.

b. Kerja Sama dengan Instansi Lain

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Disdukcapil Bulukumba telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan pemerintah desa. Kerja sama ini terwujud dalam bentuk layanan kolektif di sekolah dasar serta kegiatan bersama di posyandu dan balai desa. Strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau anak-anak usia sekolah dan balita secara lebih masif.

Namun, kerja sama dengan pihak non-pemerintah, seperti sektor swasta atau organisasi masyarakat, belum sepenuhnya berjalan. Misalnya, rencana menjalin kerja sama insentif promosi dengan toko alat tulis atau swalayan lokal untuk memberikan potongan harga bagi anak yang memiliki KIA masih belum terealisasi karena keterbatasan respon dan kurangnya model insentif yang menarik bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, aspek integrasi dalam pelayanan KIA di Kabupaten Bulukumba menunjukkan adanya kemajuan, namun masih perlu penguatan. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih sistematis dan pelibatan pihak luar yang lebih intensif agar upaya peningkatan kepemilikan KIA dapat berjalan lebih optimal dan inklusif.

3.3. Adaptasi

Adaptasi dalam teori efektivitas Duncan menunjukkan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan, mengatasi hambatan, serta melakukan penyesuaian baik dalam struktur, strategi, maupun sarana untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba, aspek adaptasi dapat dilihat dari keberadaan struktur yang bertanggung jawab terhadap pelayanan KIA serta dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan.

a. Adanya Bagian Khusus yang Bertanggung Jawab atas Pelayanan KIA

Hingga saat ini, belum tersedia unit atau bagian khusus di Disdukcapil Kabupaten Bulukumba yang secara spesifik menangani layanan Kartu Identitas Anak. Pengurusan KIA masih menjadi bagian dari tugas rangkap yang dijalankan oleh petugas pelayanan umum, yang juga menangani dokumen lainnya seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat pindah. Kondisi ini menyebabkan pelayanan KIA belum mendapatkan perhatian penuh dan terfokus sebagaimana mestinya.

Minimnya pembagian tugas yang jelas serta beban kerja petugas yang cukup padat menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan layanan KIA, terutama dalam menjangkau masyarakat secara proaktif. Idealnya, dibutuhkan penunjukan personel khusus atau tim teknis yang fokus menangani penerbitan, pencetakan, hingga distribusi KIA agar pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan terorganisir.

b. Sarana dan Prasarana yang Menunjang Program

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan. Di Kabupaten Bulukumba, fasilitas cetak KIA masih sangat terbatas. Printer khusus KIA hanya tersedia di dua lokasi, yakni di Mal Pelayanan Publik dan pada mobil pelayanan keliling. Selain itu, belum tersedia loket khusus atau ruang layanan yang secara eksklusif melayani permohonan KIA.

Minimnya fasilitas ini berdampak langsung pada waktu tunggu dan kenyamanan pemohon, karena proses pencetakan seringkali harus antre bersama dengan layanan lainnya. Selain itu, belum maksimalnya penggunaan media informasi digital dan sistem antrean online juga menunjukkan perlunya pengembangan sarana berbasis teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan memperluas akses informasi kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adaptasi Disdukcapil Kabupaten Bulukumba dalam menghadapi tantangan pelayanan KIA masih tergolong cukup, namun belum sepenuhnya optimal. Dibutuhkan penyesuaian struktural dan peningkatan sarana yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, terutama dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba menunjukkan sejumlah dampak positif dalam rangka memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang inklusif dan responsif. Program ini menjadi langkah awal dalam menjamin hak sipil anak serta mendekatkan pelayanan publik ke tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak yang belum memiliki dokumen identitas resmi.

Penulis menemukan bahwa efektivitas program KIA diukur dari tiga aspek utama menurut teori Duncan, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam aspek pencapaian tujuan, meskipun angka kepemilikan KIA masih berada di bawah target nasional, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari inisiatif pelayanan kolektif di sekolah, layanan keliling, dan program inovatif seperti Lorong Jelita. Keterlibatan sekolah dan dukungan kepala desa dalam pelayanan kolektif juga menjadi faktor pendukung tercapainya target parsial tersebut. Sama halnya seperti temuan Hanandha et al. (2021) dan Zurriyatul Husna (2022), bahwa pendekatan pelayanan yang langsung menyasar komunitas mampu mendorong capaian administratif secara lebih merata.

Pada dimensi integrasi, peneliti menemukan bahwa adanya kerja sama dengan Dinas Pendidikan serta keterlibatan kepala desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program. Program pelayanan KIA tidak berjalan secara sektoral, melainkan melibatkan lintas sektor yang turut memobilisasi masyarakat. Namun, pelibatan pihak nonpemerintah seperti organisasi masyarakat dan pelaku usaha lokal belum optimal, padahal potensi kolaborasi sangat terbuka. Temuan ini senada dengan penelitian Muhammad Rizqi Haji Ega Firnanda (2020) yang menyebut bahwa efektivitas program pelayanan administrasi memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan mitra eksternal.

Dalam aspek adaptasi, Disdukcapil Kabupaten Bulukumba menunjukkan kemauan untuk berinovasi melalui program jemput bola dan mobil pelayanan. Namun, keterbatasan SDM, tidak adanya bagian khusus untuk pelayanan KIA, serta minimnya fasilitas seperti printer dan ruang khusus menjadi tantangan nyata dalam penerapan layanan yang adaptif. Belum tersedianya sistem antrean digital maupun sistem informasi publik yang kuat juga menjadi hambatan teknis. Temuan ini memperkuat argumen Silalahi (2015) bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan dalam kondisi riil yang tidak selalu ideal.

Program pelayanan KIA ini juga mencerminkan adanya kepedulian pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar anak sejak dini melalui pendekatan administrasi yang lebih manusiawi dan partisipatif. Program ini bukan hanya soal penerbitan dokumen, tetapi juga soal bagaimana negara hadir dalam kehidupan anak-anak melalui pelayanan dasar yang adil dan setara. Hal ini mendukung

pandangan Gatingsih dan Sutrisno (2017) bahwa pelayanan publik merupakan bentuk kewajiban negara atas kontribusi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi, sehingga pelayanan harus diberikan secara maksimal dan merata.

Adapun beberapa temuan penting yang dapat disarikan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Adanya peningkatan capaian KIA dari tahun ke tahun, meski belum mencapai target nasional;
- b. Peran aktif sekolah dan kepala desa dalam pelayanan kolektif turut mendorong jangkauan layanan;
- c. Program jemput bola (Lorong Jelita) menjadi bentuk adaptasi inovatif, meskipun terbatas oleh SDM dan fasilitas;
- d. Integrasi dengan instansi lain berjalan baik, namun belum banyak melibatkan sektor swasta atau komunitas lokal;
- e. Kesadaran masyarakat masih rendah, khususnya di daerah pelosok, sehingga memengaruhi permintaan layanan;
- f. Belum adanya unit atau petugas khusus untuk KIA menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya terfokus dan efisien.

Secara keseluruhan, program pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bulukumba memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan administrasi kependudukan anak. Namun, perlu adanya penguatan dari segi infrastruktur, SDM, strategi sosialisasi, serta kolaborasi lintas sektor agar efektivitas program ini dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Harapannya, melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan mendekatkan negara pada seluruh anak-anak di wilayahnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan beberapa temuan menarik yang menjadi catatan penting di luar kerangka teori utama, namun tetap relevan dalam memahami kondisi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bulukumba. Temuan ini menjadi gambaran nyata tantangan di lapangan yang dihadapi baik oleh pelaksana layanan maupun masyarakat sebagai pengguna.

Salah satu temuan penting adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap urgensi kepemilikan KIA. Sebagian besar masyarakat hanya mengurus KIA jika terdapat keperluan mendesak, seperti pendaftaran sekolah, pengurusan BPJS, atau pembukaan rekening bank anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen identitas anak masih bersifat fungsional dan belum menyentuh aspek kesadaran administratif sejak dini.

Selain itu, penulis menemukan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi kendala tersendiri. Misalnya, hanya terdapat dua unit printer KIA yang aktif digunakan, masing-masing di Mal Pelayanan Publik dan mobil pelayanan keliling. Tidak tersedianya loket khusus untuk pelayanan KIA, serta belum tersedianya sistem antrean digital atau layanan daring yang ramah pengguna, membuat proses pelayanan sering terhambat dan menimbulkan antrean yang panjang.

Tidak adanya petugas khusus yang menangani pelayanan KIA juga menjadi salah satu hambatan internal. Petugas pelayanan masih merangkap mengurus berbagai jenis dokumen

kependudukan lainnya. Hal ini berdampak pada tidak fokusnya pelayanan, keterbatasan waktu, dan rendahnya intensitas pelayanan khusus untuk KIA.

Temuan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Padahal, penggunaan media sosial dan aplikasi pelayanan daring berpotensi besar untuk menjangkau masyarakat, khususnya generasi muda. Rendahnya literasi digital di beberapa wilayah dan belum adanya pendekatan berbasis komunitas menjadi tantangan tersendiri.

Dari sisi lingkungan sosial, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kawasan adat belum menjadikan dokumen identitas sebagai prioritas. Hal ini disebabkan oleh budaya administratif yang belum mengakar serta keterbatasan akses layanan. Kondisi geografis seperti jauhnya jarak ke kantor Disdukcapil atau sulitnya sinyal internet di beberapa kecamatan juga memperkuat hambatan tersebut.

Dengan demikian, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pelayanan KIA bukan hanya bersumber dari teknis administrasi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu strategi yang lebih adaptif dan partisipatif untuk mendorong efektivitas pelayanan KIA yang benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berada pada kategori cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tiga indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985), yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dari sisi pencapaian tujuan, berbagai inovasi pelayanan seperti program jemput bola “Lorong Jelita”, pelayanan kolektif di sekolah, dan digitalisasi layanan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan cakupan kepemilikan KIA. Meski begitu, target nasional 70% pada tahun 2024 belum tercapai karena capaian baru berada di angka 45,65%.

Dari aspek integrasi, Disdukcapil telah berhasil menjalin kerja sama dengan instansi pendidikan, kesehatan, dan perangkat desa yang turut mendukung kegiatan pelayanan kolektif. Namun, kerja sama dengan pihak swasta belum terwujud karena keterbatasan fasilitas insentif dan kurangnya minat dari mitra usaha lokal.

Sementara dalam dimensi adaptasi, Disdukcapil telah melakukan penyesuaian terhadap sarana, prosedur layanan, dan struktur organisasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pencetakan, serta rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan wilayah yang hanya berfokus pada Kabupaten Bulukumba, serta keterbatasan waktu dan akses terhadap data kuantitatif sekunder yang lebih terperinci.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian serupa dilakukan di wilayah lain di Sulawesi Selatan atau daerah dengan kondisi geografis serupa untuk membandingkan strategi pelayanan dan efektivitasnya. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi lebih dalam dampak sosial-ekonomi dari kepemilikan KIA terhadap akses pendidikan dan kesehatan anak-anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada informan, petugas lapangan serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan membantu kelancaran proses pengumpulan data. Segala bentuk bantuan, kerja sama, dan arahan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Jakarta: pustaka pelajar.
- Duncan, R. (1973). Multiple Decision-making Structures in Adapting to Environmental Uncertainty. *Human Relations*, 26(3), 273–291. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/001872677302600301>
- Gatiningsih dan Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. In *Modul mata kuliah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku_GATI_dan_EKO_Kependudukan LENGKAP.pdf)
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta. <http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku>
- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* <https://www.neliti.com/publications/525728/analisis-implementasi-good-governance-dalam-mewujudkan-pelayanan-publik-yang-ber>
- Larasati, H., & Widowati, N. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 61–77.
- Munawaroh, N. (2017). Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Spesifikasi Blanko Register Akta Kelahiran Sebagai Salah Satu Faktor Pembangunan Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Kependudukan Dan Catatan Sipil*, 5(1), 51–88. <http://eprints.ipdn.ac.id/4534/>
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Octaviani, N. (2021). *Penelitian Yogi Aprianto (2020) dengan judul Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Semarang menemukan bahwa penerbitan KIA telah dilaksanakan dengan jumlah cukup signifikan, yaitu sebanyak 133. 2507*(February), 1–9.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/98089/NTg1MzM2/Efektivitas-Anjungan-Dukcapil-Mandiri-ADM-Dalam-Meningkatkan-Cakupan-Kepemilikan-Kartu-Identitas-Anak-KIA-di-Dinas-Kependudukan-Dan-Pencatatan-Sipil-Kabupaten-Bogor-abstrak.pdf>
- Ratnawati, S., Ismail, & Kurniawati, R. (2023). Evaluasi Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Pada Sistem Layanan Kependudukan Go Digital Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(2), 14–27.
<https://doi.org/10.56071/jian.v7i2.665>
- Rizqi Haji Ega Firnanda, M. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, 13(2), 1–12. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/36897/32848>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Sillahi, U. (2015). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, F. (n.d.). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sri Hardjanto, U. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 301–313.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Windi Dwi Arista, W. S. (2019). *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU* Windi Dwi Arista Wayan Suderana. 3(1), 56–66.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/1733>
- Yulimalinda, S. Y. (2022). Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh. *Repositori Ar-Rainny*.
<http://repository.ar-rainny.ac.id>
- Zurriyatul Husna, & Mayarni, M. (2022). EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI OASE (Online Anywhere Service) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 106–115. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.676>